

---

---

**Evaluation of BOS Fund Accountability for Good Governance in Schools  
[Evaluasi Akuntabilitas Dana BOS untuk Good Governance di Sekolah]**

---

---

Nur Istiqomah<sup>1</sup>, Fityan Izza Noor Abidin<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Correspondence author Email: [fityan@umsida.ac.id](mailto:fityan@umsida.ac.id)

Paper received: January-2024; Accepted: March-2024; Publish: April-2024

---

---

**Abstract**

This research investigates the evaluation of accountability for the management of BOS funds as an effort to realize good governance in schools. Utilizing a descriptive qualitative approach, the study involves the principal, BOS fund treasurer, school committee, and teachers directly engaged in BOS fund management. Data collection methods include interviews, observation, and documentation analysis. Findings indicate that the school's adherence to good governance principles—transparency, openness, and adherence to regulations—is commendable in managing BOS funds. This study contributes to understanding the effective implementation of governance principles in educational fund management, suggesting implications for policy and practice in school financial management and accountability.

**Keywords:** Accountability; BOS Fund Management; Good Governance; School Financial Management

---

---

**Abstrak**

Penelitian ini menyelidiki evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik di sekolah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan sekolah terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik - transparansi, keterbukaan, dan ketaatan pada peraturan - patut dipuji dalam mengelola dana BOS. Studi ini berkontribusi dalam memahami penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif dalam pengelolaan dana pendidikan, serta memberikan implikasi terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sekolah.

**Keywords:** Akuntabilitas; Pengelolaan Dana BOS; Tata Kelola yang Baik; Pengelolaan Keuangan Sekolah

---

---

**Copyright and License**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



---

## **1. Pendahuluan**

Istilah Good Governance pertama kali dipopulerkan oleh World Bank dan mempublikasikannya pada tahun 1992. Jika dilihat dari istilahnya, “good” memiliki makna “baik” dan “governance” merupakan kata sifat yang memiliki arti “tata cara pengendalian atau tindakan”. Oleh karena itu, good governance sebagai salah satu tata kelola pemerintah yang dikelola secara mutlak dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat [1].

Lebih lanjut, [2] menjelaskan bahwa prinsip good governance kini menjadi cita-cita dari semua pemerintahan di era modern. Secara sederhana Good governance adalah model sekaligus praksis pemerintahan yang ditandai oleh adanya kerja sama/mitra antara pemerintah, warga, dan swasta dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat yang memiliki keberpihakan yang jelas dan tegas.

Good governance juga dapat dilakukan di lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan artikel [3] yang menyatakan bahwa suatu negara bisa dikatakan maju jika pendidikan di suatu negara tersebut maju, karena pendidikan di suatu negara sangatlah berpengaruh dalam memajukan dan membangun suatu negara serta dapat meningkatkan taraf hidup pada masyarakat. Pendidikan berperan penting untuk membentuk karakter masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat membangun negara yang maju. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peluang memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu adalah dengan menyelenggarakan program penyediaan dana bagi pelajar programnya disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu program pemerintah yang berfungsi guna pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Menurut [4] tujuan dari diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, [5] menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 48 Sistem Pendidikan Nasional memuat pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kemendikbud membuat strategi baru tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya Permendikbud akan mendukung pengukuhan pengelolaan keuangan pendidikan, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja pendidikan, sehingga mendorong peningkatan kualitas belanja pendidikan. Kebijakan pemerintah yaitu mewajibkan semua sekolah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

=====

Akuntabilitas adalah istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen [6]. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [7], yaitu akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek antara lain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas prosedural. Hal tersebut juga sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengelolaan dana yang menerapkan prinsip pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah guna mencapai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan sehingga dapat mewujudkan good governance dan akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance di Sekolah".

## **2. Metode**

### **Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya mewujudkan good governance di sekolah.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak [8].

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai penerima dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPALIS Krian yang berada dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Alasan pemilihan tempat penelitian dikarenakan peneliti bekerja di SMK YAPALIS Krian yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data lebih akurat dibandingkan dengan di SMK lainnya. Selain itu SMK YAPALIS Krian dari mulai tahun berdiri yaitu tahun 2008 hingga

=====

pada tahun 2022 mengalami perkembangan peserta didik yang signifikan. Menurut data pokok Pendidikan tahun pelajaran 2021/2022 semester ganjil atau tahun 2022 SMK YAPALIS Krian termasuk memiliki peserta didik terbesar kedua di Kecamatan Krian sekitar 1.472 peserta didik jika dibandingkan dengan SMK sekitar yang berada di Kecamatan Krian.

Menurut [12], sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

a) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen laporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) [13].

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Observasi untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai fenomena-fenomena baik berupa peristiwa maupun tindakan dalam situasi yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum SMK YAPALIS Krian. Khususnya observasi ini dilakukan untuk mengamati Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian.

Teknik analisis data merupakan salah satu cara menganalisis data penelitian yang kita temukan di lapangan, analisis data juga berfungsi untuk meringkas dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Berikut langkah-langkah analisis data model interaktif [15]:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Yaitu pengumpulan data awal atau data mentah yang belum diolah dari hasil wawancara oleh Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Guru dan hasil observasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dokumentasi Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh peneliti.

Setelah semua data terkumpul penyederhanaan dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan dan mentransformasikan keabsahan data asli menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

=====

Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah naratif, menyajikan data dalam bentuk kumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. data yang terkumpul dibandingkan dengan Permedikbud Nomor 6 Tahun 2021, dan selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga lembaga pendidikan hal ini mulai disadari dan disikapi dengan melakukan redesain sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya adalah mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Menurut [16], "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara [17] mendefinisikan akuntabilitas "*is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do.*" Lebih lanjut dikemukakan bahwa "*Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action.*" Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders sekolah. Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

#### **• Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel.**

Kata komitmen ini berasal dari bahasa latin yaitu "*commiter*" yang artinya adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan dan mempercayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu atau

---

kontrak. Selain setia pada suatu perjanjian, komitmen juga dapat terlihat dari tindakan. Sekarang ini, di dalam dunia kerja, organisasi, dan hubungan manusia ini dibutuhkan komitmen. Kemampuan melakukan komitmen juga dibutuhkan dalam suatu organisasi serta Perusahaan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencapai visinya. Misi perusahaan didefinisikan sebagai tujuan dan alasan didirikannya perusahaan atau lembaga tersebut. Misi juga menentukan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Sedangkan, Akuntabel adalah suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Tindakan ini menjadi suatu pilar penting untuk kemajuan organisasi mengingat bahwa dalam suatu perusahaan atau lembaga, para pemangku kepentingan telah mempercayakan hak-hak mereka kepada seorang pemimpin atau pengelola.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang pertama yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah :

*“Menurut saya, agar komitmen antara pimpinan dan tim manajemen BOS dapat berjalan dengan lancar, baik dan tertib perlu dibentuk adanya SK Tim Manajemen BOS. Dengan adanya SK tersebut maka seluruh tim manajemen dapat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tugas dan komitmennya, sehingga dapat menghasilkan laporan BOS yang akuntabel. Sedangkan pada tingkat pusat kepala sekolah pun harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana BOS pada setiap tahunnya.”* (wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. tanggal 18 April 2023)

Hasil wawancara tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

*“Jadi di sekolah ini dibentuk SK Tim Manajemen BOS, sehingga seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan seluruh tim tersebut terlibat. Ini salah satu cara agar komitmen yang telah disepakati dapat terlaksana dengan lancar, baik dan tertib.”* (wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah tanggal 18 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen antara pimpinan dengan tim manajemen pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tim Manajemen BOS yang terdiri dari pimpinan, guru, komite dan orang tua/wali murid yang menjadi tim manajemen BOS. Setiap empat bulan sekali/tiap enam bulan sekali sekolah akan membuat laporan pertanggungjawaban BOS. Sedangkan setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah. Hasil penelitian ini sesuai dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 Pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh: a. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sidoarjo; dan b. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah/ Madrasah.

**B. Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

[18] berpendapat bahwa Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri segala bentuk penyusunan laporan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pelaporan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan-peraturan tersebut tercantum dalam juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dikelola.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah adalah sebagai berikut :

*“Sekolah mempunyai juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS di sekolah. Karena dengan adanya juknis tersebut sekolah dapat melangkah dengan mudah sesuai peraturan perundang-undangan. Di dalam juknis tersebut mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dana BOS. Sehingga itu memudahkan sekolah dalam melakukan segala proses dari mulai perencanaan hingga pelaporan kepada kementerian.”* (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. tanggal 18 April 2023)

Hal ini didukung pernyataan Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS:

*“Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) itu sekolah membuat dengan berpedoman pada JUKNIS yang berlaku.”* (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Hasil wawancara dengan Drs. Roziq selaku komite sekolah adalah sebagai berikut :

*“Juknis itu yang digunakan sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS.”* (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

*“Dalam penyusunan suatu anggaran itu harus ada petunjuknya atau pedomannya sehingga dana yang dikeluarkan itu jelas penggunaannya.”* (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

*“Semua sekolah harus memiliki Juknis BOS. Karena juknis BOS itu sendiri tiap tahun selalu ada dan biasanya ada perubahan dalam poin penggunaannya. Juknis itu sendiri yang nantinya akan digunakan oleh sekolah dalam hal penganggaran suatu RKAS. Juknis ini juga berisi tentang larangan-larangan yang tidak boleh*

---

*dilakukan oleh sekolah sehingga sekolah bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan sekolah.” (Wawancara 17 April 2023)*

Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman sangat penting bagi sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan. Sehingga, setiap sekolah wajib memiliki Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat mewujudkan salah satu prinsip akuntabilitas tersebut. SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hasil penelitian ini didukung dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 yaitu Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Sesuai dengan hasil wawancara SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi target tersebut.

### **C. Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan**

Sementara, Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Sasaran dana BOS yaitu SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah yaitu :

*“Dana BOS yang telah diperoleh telah dikelola dengan baik oleh tim manajemen BOS sesuai dengan perencanaan yang telah diinputkan pada aplikasi ARKAS. Mengenai serapannya memang masih belum seimbang, karena dana BOS masih banyak digunakan pada kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah sekitar 44,35% dan Administrasi Kegiatan Sekolah sekitar 23,72% dimana sisanya untuk kegiatan yang lainnya. Tetapi itu membuktikan bahwa dana BOS yang telah dikelola mencapai tujuan dari pemerintah.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)*

Hal tersebut didukung dengan pendapat Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

*“Menurut saya, dana BOS sudah dikelola sesuai dengan pedoman dari Juknis. Dan Tim manajemen melakukan pengelolaan dana BOS dengan sangat baik, sehingga*

---

*tujuan pemerintah memberikan bantuan tersebut dapat tercapai. Untuk serapannya, Alhamdulillah dapat terserap 100% untuk seluruh poin kegiatan yang ada dalam Juknis.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)*

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

*“Tujuan pemerintah untuk memberikan Dana BOS adalah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal dan ini sudah diupayakan oleh sekolah untuk mencapainya. Setiap tahunnya dana BOS yang telah diberikan pemerintah dapat terserap 100% oleh sekolah.” (Wawancara 19 April 2023)*

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

*“Saya ikut masuk dalam Tim Manajemen BOS. Kami mulai dari perencanaan itu sudah mengupayakan agar tujuan dari diberikannya dana BOS ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Dan tim manajemen BOS selalu menata bagaimana agar serapannya ini dapat merata untuk setiap poin kegiatan yang ada pada Juknis.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah memberikan bantuan dana BOS adalah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Sehingga SMK YAPALIS Krian menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan diberikannya dana BOS. Dan untuk daya serapannya SMK YAPALIS Krian telah terserap 100%, meski tidak merata diantara 12 poin kegiatan tersebut.

#### **D. Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh**

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Berikut hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. sebagai kepala sekolah :

*“Manfaat yang didapatkan oleh sekolah dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah.” (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. pada tanggal 18 April 2023)*

Berikut penuturan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

*“Manfaat yang didapatkan oleh sekolah dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah.” (Wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah pada tanggal 18 April 2023)*

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

*“Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya dana BOS ini salah satunya pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar, pemenuhan kebutuhan sarana dan*

---

*prasarana sekolah, serta tambahan honor guru.” (Wawancara dengan Drs. Roziq pada tanggal 19 April 2023)*

Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa sekolah telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien digunakan untuk membiayai seluruh pos pengeluaran yang telah dianggarkan.

**E. Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas**

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Inovatif juga sering dimaknai sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan *skill* guna beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di era digital seperti saat ini, perubahan di segala bidang sangat cepat terjadi. Maka dari itu, kemampuan inovatif sangat dibutuhkan agar tidak tertinggal zaman.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah :

*“Sekolah menyusun laporan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Juknis dan sesuai dengan petunjuk/arahan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk tahapannya, awalnya sekolah pada bulan Juli tahun sebelumnya melakukan input data siswa pada Dapodik yang nantinya akan digunakan sebagai cut off perhitungan untuk perolehan dana BOS pada tahun anggaran yang akan datang. Kemudian akan terbit SK penerimaan dana BOS dari Kemendikbudristek biasanya pada bulan Februari, sehingga kita akan membentuk Tim Manajemen BOS di sekolah. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Sekolah akan melakukan pertemuan/rapat untuk penyusunan RKAS. Dari hasil pertemuan/rapat itu nanti kita dapat memverifikasi mana saja kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dapat dilakukan eksekusi pada tahun anggaran 2022 ini. Setelah RKAS dalam bentuk excelnya jadi dan sudah sesuai maka kita masukkan kedalam ARKAS. Pada tahun 2022 ini ada yang baru mbak, biasanya kita laporan secara manual yang semua laporan kita kerjakan menggunakan excel tapi sekarang lewat aplikasi ARKAS yang dari Kemendikbudristek ini. Jadi setelah RKAS tadi diinputkan dalam ARKAS kemudian kita akan melakukan pengajuan ke pusat untuk pengesahan ARKAS tersebut. Setelah disahkan oleh pusat baru kita bisa lanjut ke entri BKU untuk menginputkan pembelanjaan apa saja yang telah dieksekusi sesuai dengan bulannya. Tapi ini juga tidak bisa langsung diinputkan karena kan tidak selalu dana BOS ini cair tepat waktu. Kita bisa melakukan input tersebut kalau dana BOSnya sudah turun. Untuk pengambilan dana BOS itu sendiri juga harus sesuai*

---

*dengan kebutuhan, tidak bisa diambil sekaligus. Setelah input BKU kita sinkronisasi dan biasanya secara otomatis apa yang kita input pada ARKAS akan muncul pada website kemdikbud <https://bos.kemdikbud.go.id/>. Dan selanjutnya biasanya kita setiap 4 bulan sekali akan ada jadwal untuk pelaporan pertanggungjawaban ke Dinas setempat. Dari sini Dinas setempat dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah mengenai pengelolaan dana BOS. Biasanya Dinas akan melakukan pengecekan bukti-bukti penggunaan dana BOS apakah sudah sesuai ataukah masih kurang. Setelah dilakukan pengecekan oleh dinas bukti-bukti tadi kita simpan di Ruang BOS yang ada disekolah untuk keperluan monitoring/pemeriksaan dari pihak terkait. Dari laporan pertanggungjawaban ini kita tahu bahwa laporan ini dapat dikatakan transparan, untuk pembelajaran inovatif kita bekerja sama dengan para guru agar bagaimana dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah jujur dalam pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan RKAS dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pelaporan dana BOS mulai tahun anggaran 2022 ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan ARKAS. Dan para tim manajemen BOS sekolah selalu melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan.

### **Pengelolaan Akuntabilitas Agar Dapat Mewujudkan *Good Governance***

Dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan sebuah unsur untuk mempertahankan kepemimpinan yang layak yaitu melalui akuntabilitas. *United Nation Development Programme* (UNDP) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut

=====  
dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Diterapkannya *Good Governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

SMK YAPALIS Krian juga berupaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut melalui akuntansi pengelolaan dana BOS. Upaya yang dilakukan SMK YAPALIS Krian yaitu dengan menerapkan tiga konsep *good governance* pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Berikut penjelasannya :

- **Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

Hasil wawancara dengan informan terkait penerapan transparansi dan keterbukaan dalam upaya mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian dengan pertanyaan “*Apakah sekolah mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada stakeholders internal dan eksternal?*” yang menurut pendapat Drs. Mujiono, M.A.P. sebagai kepala sekolah :

“*Ya, Sekolah mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Publikasi tersebut biasanya dilakukan lewat media grup whatsapp sekolah untuk stakeholders internal dan melalui laporan ringkas berupa hardfile dan juga softfile yang dikirimkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Sidoarjo serta laporan online melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai bentuk pemberitahuan untuk stakeholders eksternal. Publikasi internal diperuntukkan kepada seluruh pihak yang ada di sekolah seperti guru, karyawan dan komite sekolah. Untuk di bagian eksternal kita publikasikan kepada Yayasan, orang tua/wali murid, Cabang Dinas dan juga Kementerian.*” (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P pada tanggal 18 April 2023)

Berikut penjelasan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

“*Ya, semua kita publikasikan dari mulai perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS.*” (Wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

---

*“Ya, sekolah melakukan publikasi pada setiap kegiatan sekolah terutama yang berhubungan dengan dana BOS.”* (Wawancara dengan Drs. Roziq pada tanggal 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :  
*“Ya, biasanya dipublikasikan melalui rapat internal dan dipublikasikan di papan informasi sekolah agar lebih mudah dilihat oleh orang yang membutuhkannya.”* (Wawancara dengan Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd pada tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

*“Ya, SMK YAPALIS Krian biasanya melalui laporan-laporan dan rapat-rapat disampaikan/diperlihatkan hasilnya seperti foto-foto kegiatan dan juga barang-barang yang telah dibeli menggunakan dana BOS. Selain itu dipublikasikan lewat papan informasi sekolah.”* (Wawancara dengan Rima Citra Fiyanti, S.Sos pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai transparansi dan keterbukaan menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak SMK YAPALIS Krian sudah bersifat transparansi dan keterbukaan. Dimana transparansi dan keterbukaan tersebut merupakan unsur dari *good governance*, sehingga pelaporan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, transparan dan keterbukaan.

### **Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Didalam juknis tersebut menjelaskan semuanya yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS diantaranya Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk: identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan; penguatan pelatihan griyaan (*in house training*); penguatan komunitas belajar bagi kepala dan pendidik; pelatihan mandiri dengan komunitas praktis; pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru; dan/ atau peningkatan kapasitas literasi digital. kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya juknis tersebut dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi prinsip *Good Governance* yaitu transparan, keterbukaan dan aturan hukum. Dengan adanya juknis tersebut penggunaan dana BOS dapat diawasi karena pelaporan yang dibuat. Dan meminimalisir adanya kecurangan dalam penggunaan dana BOS karena sudah ada juknis resmi yang dikeluarkan.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2022 pasal 28 ayat 2 yaitu Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: pengembangan sumber daya manusia; pembelajaran dengan paradigma baru; digitalisasi sekolah; dan perencanaan berbasis data. Sehingga dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian Menjamin Penggunaan Sumber Daya

---

Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*.

Hasil ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMK Yapalis Krian. Menurut Drs. Mujiono, M.A.P selaku kepala sekolah berpendapat sebagai berikut :

*“Ya, Sekolah memiliki keterbukaan dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Pada proses perencanaan keterbukaan itu ditandai dengan pembentukan tim manajemen BOS Sekolah yang kemudian tim tersebut akan melakukan analisis kebutuhan prioritas sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga tim tersebut dapat memberikan perencanaan kebutuhan sekolah untuk dentrykan kedalam Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yaitu ARKAS. Setelah dilakukan entryan perencanaan kemudian tim tersebut akan melakukan pembelanjaan secara mandiri, sehingga pihak pimpinan tidak turut serta dalam pembelanjaan tersebut itulah keterbukaan dalam penggunaan dana BOS ini. Kemudian pada proses pelaporan tim manajemen akan melakukan pemberkasan sesuai dengan pelaporan yang diminta oleh kementerian.”* (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Berikut penjelasan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :  
*“Ya, dalam membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan/pengelolaan dan pelaporan itu kita membuat dengan berpedoman atau berdasarkan pada petunjuk teknis (JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2022. Jadi dalam penggunaan Dana BOS itu guru, karyawan, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap kegiatan dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan itu kita masukkan kedalam aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yaitu ARKAS. Dengan menggunakan ARKAS ini kami merasa terbantu karena penggunaannya yang cukup mudah meski awal-awal kita mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya dan aplikasi ini mulai digunakan pada cawu 2 yaitu sekitar bulan Juli 2022.”* (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

*“Ya, sekolah menerima saran atau kritikan dari pihak internal maupun eksternal demi terlaksananya program BOS yang akuntabel dan transparans.”* (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

*“Jelas, dalam proses penyusunan RKAS guru, komite dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkan mana yang akan dijadikan prioritas. Penggunaan/pencatatan Dana BOS itu dicatat di ARKAS dan buku kas sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran itu dicatat di ARKAS dan buku kas sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan*

*kepada setiap stakeholders yang ingin melihat jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi. Semua dana BOS yang kita gunakan itu sesuai dengan RKAS yang telah dibuat sebelumnya, apalagi ada yang namanya bukti seperti kwitansi itu sudah mendukung bahwa penggunaan dana BOS itu digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)*

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

*“Ya, SMK YAPALIS Krian ini terbuka terhadap stakeholders yang berkepentingan, yaitu melibatkan tim manajemen, komite, guru dan karyawan dalam menyusun anggaran BOS dengan cara mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan. SMK YAPALIS Krian juga terbuka dalam proses penggunaannya/ pencatatannya semuanya bisa dilihat langsung pada ARKAS dan juga di laporan pertanggungjawaban dan pada saat menggunakan dana BOS juga harus disertai dengan kwitansi dan juga bukti-bukti. SMK YAPALIS Krian menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi dan bukti-bukti fisik sebagai pendukungnya.” (Wawancara 17 April 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai keterbukaan (*openness*) menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki unsur keterbukaan. Sehingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menerima saran dan masukkan dari setiap *stakeholder* baik dari Internal maupun Eksternal Lembaga.

### **C. Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

Pada dasarnya Pemerintah memberikan bantuan dana BOS untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Sehingga SMK YAPALIS Krian menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan diberikannya dana BOS. Dan untuk daya serapannya SMK YAPALIS Krian telah terserap 100%.

Selain itu, pelaporan yang dibuat juga sudah memenuhi unsur aturan hukum yang mana segala bentuk pengeluaran harus ada bukti yang sah dari pihak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 3 point 3 yang menjelaskan beberapa hal yaitu Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah; Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bermaterai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000 tidak dikenakan materai, untuk transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan bermaterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000 dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp.

1.000.000 dikenai bea meterai Rp. 6.000,-. Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah/madrasah dan lunas dibayar oleh bendahara. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah/madrasah sebagai bahan bukti dan bahan laporan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi semua unsur *Good Governance* dalam prinsip akuntabilitas yang ketiga.

**D. Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa sekolah telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien digunakan untuk membiayai seluruh pos pengeluaran yang telah dianggarkan. Manfaat yang didapatkan oleh SMK YAPALIS Krian dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggara pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah. Hal ini sesuai dengan visi misi yang ada di SMK YAPALIS Krian.

Untuk mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian, sekolah berupaya menerapkan konsep *good governance* diantaranya menerapkan konsep transparan dan keterbukaan dalam seluruh pelaporan yang di buat. Selain itu, SMK YAPALIS Krian juga Mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Publikasi tersebut biasanya dilakukan lewat media grup whatsapp sekolah untuk stakeholders internal dan melalui laporan ringkas berupa hardfile dan juga softfile yang dikirimkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Sidoarjo serta laporan online melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai bentuk pemberitahuan untuk stakeholders eksternal. Publikasi internal diperuntukkan kepada seluruh pihak yang ada di sekolah seperti guru, karyawan dan komite sekolah. Untuk di bagian eksternal kita publikasikan kepada Yayasan, orang tua/wali murid, Cabang Dinas dan juga Kementerian.

Selain itu, menurut undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 4 yaitu Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Monitoring ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Sidoarjo diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi

dana penerima bantuan; 2. Penggunaan dana ditingkat sekolah; 3. Administrasi keuangan; 4. Pelaporan.

Laporan berupa hardfile juga dapat digunakan sebagai konsep *good governance* tentang aturan hukum. Dengan adanya laporan tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa SMK YAPALIS sudah menggunakan dan mengelola dana BOS secara efektif tanpa adanya kecurangan yang terjadi. Hal ini juga di atur dalam undang-undang nomor 51 tahun 2020 pasal 9 ayat 2 point i yaitu menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan BOSDA dari sekolah ke Tim manajemen BOS kabupaten baik secara Online maupun offline (hardcopy).

**E. Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance***

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah jujur dalam pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan RKAS dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pelaporan dana BOS mulai tahun anggaran 2022 ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan ARKAS. Dan para tim manajemen BOS sekolah selalu melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan.

SMK YAPALIS Krian ini tergolong tertib dan tepat waktu dalam melakukan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga termasuk tertib administrasi dalam penyusunan dokumen berupa Kwitansi dan bukti-bukti fisik yang diperlukan. Tahun 2022 SMK YAPALIS Krian termasuk dalam sekolah yang laporan pertanggungjawabannya rapi dan bagus.

Hal ini menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian mewujudkan konsep *good governance* dalam pengelolaan dana BOS. Dengan adanya kwitansi dan bukti-bukti fisik yang ada menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan keterbukaan. Selain itu juga karena SMK YAPALIS Krian sudah menggunakan aplikasi ARKAS. Sehingga akan meminimalisir adanya kecurangan yang terjadi. Hal itu berarti juga menerapkan konsep aturan hukum. Karena sudah mematuhi aturan yang telah di berikan oleh tim manajemen bos. Hal tersebut juga sesuai dengan undang-undang nomor 02 tahun 2022 pasal 35 ayat 1 yaitu Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK YAPALIS Krian sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator *good governance*, yaitu transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran,

=====

hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS pada masing-masing sekolah tersebut. Selain itu, dengan membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS dan memublishnya ke pihak yang berkepentingan dapat menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan terbuka.

**Keterbatasan Penelitian**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi SMK YAPALIS Krian sebaiknya publikasi penggunaan dana BOS dilakukan di tempat umum seperti papan informasi agar transparansi lebih terbuka terhadap masyarakat sekolah dan khalayak umum.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan variabel lain seperti efektivitas yang tidak termasuk dalam penelitian ini serta penentuan indikator yang lebih tepat sehingga nantinya diharapkan dana BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan kuat terhadap hasil belajar siswa.
3. Bagi semua stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk menghindari tindakan pidana di kemudian hari.

**Saran**

Adapun keterbatasan yang dapat diberikan oleh peneliti untuk Peneliti Selanjutnya yaitu agar penelitian selanjutnya Menambahkan Informan Akademisi / Teoritis dikarenakan informan yang digunakan peneliti semua dari segi pelaksana dana BOS.

=====

**Daftar Pustaka**

- [1] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah J. Ilmu Dakwah, 2019. DOI: 10.18592/Alhadharah.V17i33.2374.
- [2] A. Dan, G. Andalas, F. Harpranisa, C. Ronanda, and F. Sulistiyowati, "Good Government Governance Dan Kualitas Anggaran," J. Akunt. Dan Gov. Andalas, vol. 3, no. 1, pp. 50–68, 2020.
- [3] A. Anggito and J. Setiawan, \*Metodologi Penelitian Kualitatif\*, 1st ed. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- [4] D. M. Resdianti, "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal," 2021.
- [5] D. Ayu Natalia, "Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Sukoharjo)," 2019.
- [6] E. Oga, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja," 2021.
- [7] Fauzan, "Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," in Perbanas Account. Conf., pp. 1–26, 2022.
- [8] J. W. Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed, Research Design. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- [9] K. U. Fadhilah, A. I. S. Lating, A. S. Sidarta, and S. F. R. Rabbani, "Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya," J. Buana Akunt., vol. 8, no. 2, pp. 151–167, 2023. DOI: 10.36805/Akuntansi.V8i2.5646.
- [10] K. U. Fadhilah, "Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada SDI Wachid Hasyim Rungkut Kidul Surabaya)," Parad. J. Ilmu Ekon., vol. 6, no. 3, pp. 172–186, 2023. DOI: 10.57178/Paradoks.V6i3.641.
- [11] L. I. F. Sulfiati and S. Alam, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)," Gov. J. Ilmu Pemerintah., vol. 2, no. 41, pp. 185–201, 2019.
- [12] L. J. Surjaman, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Revisi, cetakan ketigapuluh delapan, 2018.
- [13] M. A. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- [14] M. A. Lexy J. Moleong, "Moleong, Lexi J, 2014. 'Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi'. Bandung: Remaja Rosdakarya.," PT. Remaja Rosda Karya, 2019.
- [15] N. A. Salam, S. Basamalah, and Subhan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah," Parad. J. Ilmu Ekon., vol. 6, no. 3, 2023.
- [16] Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian," Penelitian, 2017.
- [17] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [18] Susanti, "Penerapan Good School Governance (Gsg) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (Bos) Sekolah Dasar Kota Blitar," Revital. J. Ilmu Manaj., vol. 8, no. 1, 2019. [Online]. Available:

## INQUEST JOURNAL

<https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij>

EISSN 2963-2374

Volume 2, Issues 2, April,2024

Section : Research Article

Page : 15-34

DOI : 10.53622/ij.v2i2.343

فرهنگ و رسانه های  
[http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های  
&option=com\\_dbook&task=readonline&book\\_id=13650&page=73&chckhashk=Ed9c9491b4&itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0ahttp://www.albayan.ae%0ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=Aplikasi+Pengena](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ%20و%20رسانه%20های&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhashk=Ed9c9491b4&itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0ahttp://www.albayan.ae%0ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=Aplikasi+Pengena)

- [19] A. Thanwain, A. Jumarding, and Nurhidayanti, "Penerapan Good School Governance Pada Pengelolaan Dana Operasional Sekolah," *J. Mirai Manag.*, vol. 8, no. 1, pp. 357–373, 2023.